

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 3 Tahun 2023

**Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia**

Penulis

Muhammad Findi, Marzidah, Mutiara Probokawuryan

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh lapisan masyarakat dunia termasuk di Indonesia, telah menyebabkan kemiskinan baru.
- 2) Berdasarkan data BPS RI, terjadi fluktuatif jumlah angka orang miskin di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022, selama terjadinya masa pandemik Covid-19.
- 3) BPS RI mencatat sebelum terjadinya pandemik Covid-19, pada tahun 2019 jumlah orang miskin di Indonesia berjumlah 24,79 juta jiwa, dan naik menjadi 27,55 juta jiwa pada tahun 2020, hal berarti ada kenaikan sebesar 11,13 %.
- 4) Jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 26,5 juta jiwa, atau turun 3,81 %. Kemudian berdasarkan data BPS Tahun 2022 jumlah orang miskin di Indonesia kembali berkurang secara tipis menjadi 26,26 juta jiwa.
- 5) Negara melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Sosial harus bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya dan terpeliharanya standar hidup seluruh masyarakat Indonesia akibat adanya pandemik Covid-19.
- 6) Program bantuan sosial senilai yang setiap tahunnya rata-rata berkisar Rp 27 triliun ini, diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) selama periode Covid-19 patut untuk diapresiasi.
- 7) Pengawasan terhadap penyelenggaraan program bantuan sosial yang sedang dilaksanakan, mutlak untuk dilaksanakan sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang ada di lapangan.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi strategis yang perlu diperhatikan diantaranya Kementerian Sosial sebagai lembaga eksekutif yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT sebelumnya harus melakukan pendataan dan pengecekan langsung ke daerah pada lokasi kantung-kantung kemiskinan yang terdampak pandemik Covid-19, baik dari aspek jumlah maupun kualitas barang dan dana yang disalurkan. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang akan menerima PKH maupun BPNT harus dipantau keberlangsungan hidupnya, jangan sampai terjadi penambahan miskin baru akibat terlambatnya pencairan dana PKH maupun BPNT, ataupun ada pemanfaatan dana yang keliru oleh KPM secara tidak terkendali yang tidak berdampak dalam mengurangi beban keluarga penerima manfaat. Perlunya sistem yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian sosial dengan DPR RI dan pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota dan kabupaten dalam mencegah terjadinya korupsi pemotongan dana bansos. Penegakan hukum yang tegas tanpa tebang pilih wajib dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bagi pelaku kejahatan korupsi yang memanfaatkan dana bantuan sosial secara sepihak dan merugikan anggaran negara.

Ekonomi Politik Kebijakan Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan oleh setiap penyelenggara negara, dan kesejahteraan pada masyarakat dapat dilihat dari penyediaan bahan makanan dalam rumah tangga. Negara melalui politik ekonomi yang dijalankan mampu membuat program penyediaan bahan pangan yang cukup agar terhindar dari kekurangan mengkonsumsi makanan serta gizi dalam makanan.

Keberhasilan kebijakan pemerintah dapat dilihat seberapa besar pengaruh bantuan sosial yang disalurkan mampu menekan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (KKP) yang dijadikan sebagai indikator dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

Politik ekonomi merupakan target yang menjadi sasaran hukum-hukum yang menangani pengaturan perkara kebutuhan hidup manusia. Politik ekonomi Islam memiliki tujuan terpenuhinya jaminan masyarakat dalam mengakses kebutuhan primer (*Al hajat Al asasiyah*) dan kebutuhan sekunder (*Al hajat Al kamaliyah*) secara merata (Al Maliki, 2001).

Demokrasi politik tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi dan sosial tetapi juga pada desain institusi politik. Lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif merupakan arena persaingan kekuatan-kekuatan sosial, namun mereka juga memiliki sekumpulan prosedur operasi standar dan struktur yang mendefinisikan dan membela kepentingan. Mereka adalah aktor-aktor politik dalam kekuasaan yang mereka miliki. (Hill, 1997).

Kesejahteraan masyarakat suatu negara merupakan bentuk kebijakan yang mengarah pada perlindungan sosial atau kesejahteraan publik melalui implementasi program kerja yang dilakukan seperti kesehatan masyarakat, kesejahteraan para

pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana dan lain sebagainya (Dahlan dan Irfan, 2014).

Policy response dari pemerintah sehubungan dengan kondisi perekonomian yang terganggu akibat guncangan tertentu melalui *transmission mechanism*, seharusnya masih dapat berjalan walaupun tidak optimal dan tergantung seberapa besar tingkat keparahan guncangan itu mengganggu stabilitas perekonomian di sebuah negara (Ikhsan, 2000)

Literatur ilmu ekonomi kebijakan, menyebutkan bahwa kebijakan fiskal harus dapat berfungsi sebagai *automatic stabilizer* yang artinya pada saat ekonomi mengalami gangguan akibat pandemik Covid-19, maka kebijakan defisit anggaran merupakan jawaban untuk mendorong kembali permintaan anggaran menuju keseimbangan jangka panjangnya.

Kondisi inilah menjadikan fungsi kebijakan belanja subsidi melalui bantuan sosial menjadi sangat berperan besar dalam menjaga stabilitas konsumsi masyarakat termasuk konsumsi pangan sebagai kebutuhan dasar.

Keluarga Penerima Manfaat dan Kecukupan Pangan

Kebijakan yang dibuat pemerintah selama krisis akibat pandemik Covid-19 adalah tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah memastikan pihak-pihak mana saja yang masuk sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan program bansos program keluarga harapan (PKH) maupun program bantuan pangan non tunai (BPNT).

Pada hakekatnya setiap KPM yang menerima program bansos PKH maupun BPNT harus memenuhi tingkat kesejahteraan yang layak terutama dalam hal pemenuhan pangan, pendidikan dan kesehatan yang terjamin. Para KPM yang terdiri dari ibu hamil, peserta didik tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), penyandang disabilitas, maupun manusia usia lanjut diatas 70 tahun, seluruhnya harus terjamin kehidupan yang semakin baik di saat pandemik maupun pasca pandemik Covid-19.

Bantuan sosial di masa pandemik Covid-19 adalah salah satu program pemerintah untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Masyarakat miskin cenderung sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Maka dengan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan dapat menurunkan kondisi kemiskinan dan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurut Fajriwati (2016) kemiskinan merupakan kondisi dari seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

Kebutuhan mengkonsumsi makanan menjadi suatu hal penting untuk menentukan keberlangsungan hidup. Makanan adalah sumber kekuatan bagi tubuh karena didalam makanan memiliki zat gizi yang baik untuk kesehatan. Pada kebutuhan makanan yang baik, diperlukan penyediaan pangan yang cukup. Menurut Natalia *et al* (2013) faktor status gizi masyarakat dipengaruhi dengan adanya ketahanan pangan dan tingkat kecukupan zat gizi di dalam rumah tangga.

Faktor - faktor Penghambat Keberhasilan Bansos

Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menggagalkan keberhasilan kebijakan bansos diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketidaklengkapan Data Penerima Dana Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima manfaat Oleh karena itu kelengkapan data menjadi hal yang paling utama sebelum disalurkan dana-

dana bantuan sosial tersebut. Oleh karena itu ketidaklengkapan data penerima manfaat bantuan sosial tidak akan memiliki pengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan sehingga kebijakan dana bantuan sosial menjadi tidak efektif dan efisien.

2. Penyalahgunaan Distribusi Dana Bantuan Sosial

Dana yang dikeluarkan untuk bantuan sosial program PKH maupun BPNT gagal tersalurkan sepenuhnya kepada masyarakat akibat Sistem distribusi dana bansos yang buruk, seperti keterlambatan pencairan maupun pemotongan secara sepihak oleh oknum. Jika hal ini terjadi maka pihak KPM tidak mendapatkan haknya secara utuh. Pendistribusian dana bansos yang salah sasaran ini disebabkan oleh adanya oknum yang memanfaatkan secara sepihak di lapangan.

3. Lemahnya Pengawasan penyaluran Dana Bansos

Faktor yang dapat menggagalkan keberhasilan program bansos adalah lemahnya pengawasan dari institusi penyelenggara bantuan sosial itu sendiri. Pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan program bantuan sosial tentu pihak internal Kemensos. Temuan-temuan di lapangan atas tindak pidana korupsi sudah barang tentu harus menjadi prioritas penegak hukum yang ada di negeri Indonesia, seperti pihak Polri, kejaksaan, maupun KPK.

Daftar Pustaka

- Alfedo JM, Azmi RHN. 2021. Sistem informasi pencegahan korupsi bantuan sosial (Si Pansos) di Indonesia: rumusan konsep dan pengaturan. *Jurnal anti korupsi*. 6(2): 283-296.
- Alitasari NPM, Yasa IGWM. 2018. Pengaruh produk domestik regional bruto, pengeluaran pemerintah dan inflasi terhadap tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 10(5): 2130-2157, 2303-017.

- Al Maliki, Abdurrahman. 2001. Politik Ekonomi Islam. Bangil Jatim : Al Izzah.
- Dahlan A, Irfan S. 2014. Menggagas negara kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2(1): 1-22.
- Fajriawati F. 2016. Dampak Perekonomian terhadap Masyarakat Miskin di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Ekonomi kawan*. 6(2): 1-13.
- Firdaus M. 2011. Aplikasi Ekonometrika Dengan Eviews, Stata, RStudio. Bogor (ID): IPB Press.
- Ginting S, Lubis I, Mahalli K. 2008. Pembangunan manusia di indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. 4(1): 17-24.
- Gujarati DN. 2006. Ekonometrika Dasar. Jakarta (ID): Erlangga.
- Gujarati DN. 2007. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta (ID): Erlangga.
- Gultom H, Kindangen P, Kawung GMV. 2020. Analisis pengaruh bantam nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. 21(1).
- Hill M, 1997. *The Policy Process in The Modern State*. London: Prentice Hall.
- Ikhsan M, 2000. Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Jurnal Demokrasi dan HAM. 1(2): 30-58
- Juanda B. 2009. Ekonometrika Pemodelan dan Pendugaan. Bogor (ID): IPB Press.
- Natalia LD, Rahayuning D, STP, Fatimah S, M.Kes21. 2013. Hubungan Ketahanan Pangan Tingkat Keluarga dan Tingkat Kecukupan Zat Gizi Dengan Status Gizi Balita di Desa Tahun 2012. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2(2): 1-19.
- Noerkaiser N. 2021. Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*. 2(1): 83-104.
- Sukirno S. 2000. Makroekonomi modern. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno S. 2004. Makro Ekonomi. Cetakan ke 5, Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo. Waluyo, Dwi Eko. 2.
- Sukmana O. 2005. Sosiologi dan Politik Ekonomi. Malang (ID). UMM Press.
- Sunarti E. 2012. Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di pedesaan dan perkotaan. Bogor Agricultural University.
- Suryana A. 2001. Tantangan dan kebijakan ketahanan pangan. Seminar Nasional. Jakarta. Departemen Pertanian.
- Syawie M. 2011. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Jurnal Informasi*. 16(3): 213-219.
- Tiwari S, Daidone S, Ruvalcaba MA, Prifti E, Handa S, Davis B, Niang O, Pellerano L, Ufford PQ, Seidenfeld D. 2016. Impact of cash transfer programs on food security and nutrition in sub-Saharan Africa: a cross country analysis. *Glob Food Secur*. 11:72-83.



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Dr. Muhammad Findi, M.Si. Dosen Tetap FEM IPB University, memiliki kepakaran dalam bidang ekonomi politik dan kebijakan publik.: muhammadfindi@apps.ipb.ac.id

Marzidah, S.E., alumni FEM IPB University, memiliki peminatan dalam kajian ekonomi pembangunan.



Mutiara Probokawuryan, S.E., M.Mgt (Econ), Memiliki kepakaran dalam ekonomi regional, publik dan kelembagaan.



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680